

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.07.2.409204/2019
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409204) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : S O F Y A N
Bendahara Pengeluaran : ASRIANI, SE.
Pejabat Penanda tangan SPM : SISMOLO, S.Sos., M.M., M.Si.

Halaman : IA . 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		171.043.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		171.043.000
2 Program	013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual		171.043.000
Sasaran Program	01	Terselenggaranya Layanan Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas		
	02	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas		
Indikator Kinerja Program	01.01	Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	99 Persentase	
	01.02	Persentase penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat	30 Persentase	
	01.03	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KI	3,3 indeks	
	02.01	Persentase Penyelesaian Pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku	80 Persentase	
Output Program	01	Layanan Kekayaan Intelektual		
Indikator Output Program	01	Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	99 %	
	02	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	80 %	
	03	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.3 Indeks	
Kegiatan	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		171.043.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya layanan kekayaan intelektual di kantor wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	01.01	Persentase penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	01.02	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil		
Output Kegiatan	5253.001	Layanan HKI di Daerah	10,00 Jumlah Permohonan	108.439.000
	5253.001	Layanan HKI di Daerah	10,00 Jumlah Permohonan	108.439.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	
	02	Jumlah permohonan HKI yang diajukan melalui Kanwil	3217 Permohonan	
	03	Jumlah KI Komunal yang diinventarisasi	33 Data KI Komunal	
Output Kegiatan	5253.002	Penegakan Hukum di Daerah	4,00 Jumlah Kasus	62.604.000
	5253.002	Penegakan Hukum di Daerah	30,00 Jumlah Kasus	62.604.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil	74 Kasus	
	02	Jumlah Indikasi Geografis yang Diawasi	33 Indikasi Geografis	

Jakarta, 5 Desember 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.07.2.409204/2019
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409204) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	171.043.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	171.043.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

(Dalam Ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	RpLN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.07.2.409204/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode / Nama Satker : (409204) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman II.1

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409204	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	171.043	-	-	-	171.043		
013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	-	171.043	-	-	-	171.043		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	171.043	-	-	-	171.043		
5253.001	Layanan HKI di Daerah	-	108.439	-	-	-	108.439	20.51	
04	PNBP	-	108.439	-	-	-	108.439	060	
5253.002	Penegakan Hukum di Daerah	-	62.604	-	-	-	62.604	20.51	
04	PNBP	-	62.604	-	-	-	62.604	060	
	J U M L A H	-	171.043	-	-	-	171.043		

Jakarta, 5 Desember 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.07.2.409204/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409204) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409204	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.574	3.489	6.123	9.373	9.852	10.947	19.003	18.490	20.046	20.457	22.903	28.786	171.043
		52 BELANJA BARANG	1.574	3.489	6.123	9.373	9.852	10.947	19.003	18.490	20.046	20.457	22.903	28.786	171.043
	013.07.09.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.574	3.489	6.123	9.373	9.852	10.947	19.003	18.490	20.046	20.457	22.903	28.786	171.043
		52 BELANJA BARANG	1.574	3.489	6.123	9.373	9.852	10.947	19.003	18.490	20.046	20.457	22.903	28.786	171.043

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.07.2.409204/2019
IV. A B L O K I R**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409204) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV A.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.07.2.409204/2019
IV. B C A T A N**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409204) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV B.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-013.07.2.409204/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (409204) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 171.043.000 (SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

013.07.09.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	171.043.000
Rp.	171.043.000

C. Sumber Dana Berasal :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBPNBNP TA Berjalan | Rp. | 171.043.000 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 171.043.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Ditjen Kekayaan Intelektual, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS: 2060-8087-2486-7331

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001